

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

Triwulan IV (bulan Oktober s.d. Desember) 2024 ini ditandai dengan berakhirnya musin kemarau dan memasuki awal musim penghujan. Sesuai perkiraan BMKG bahwa pada tahun 2024 ini, awal musim hujan akan lebih cepat jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan karena terjadinya Fenomena La Nina yang akan terjadi pada tahun 2024 dan berlangsung hingga 2025. Periode La Nina diprediksi akan terjadi mulai November 2024 atau akhir tahun 2024 hingga Maret atau April 2025, yang berdampak akan menyebabkan peningkatan curah hujan hingga 20-40 persen, bahkan di beberapa lokasi dapat mencapai lebih dari 50 persen. Hal ini perlu diwaspadai oleh masyarakat mengingat La Nina ini dapat menyebabkan terjadinya bencana hidrometeorologi.

Bencana hidrometeorologi berdampak buruk pada pertanian di Indonesia, karena dapat mengakibatkan beberapa resiko seperti banjir yang merendam sawah dalam waktu lama sehingga dapat menyebabkan tanaman padi membusuk dan gagal panen. Penurunan produktivitas akibat perubahan iklim dapat menyebabkan penurunan produktivitas dan pelandaian produksi pertanian. Kerusakan tanaman dapat terjadi juga akibat salinitas yang disebabkan oleh peningkatan permukaan air laut.

Disamping itu terganggunya sarana transportasi yang merupakan sarana vital distribusi barang yang diakibatkan terjadinya bencana banjir, banjir bandang, tanah longsor, ancaman gelombang ekstrim dan abrasi, cuaca ekstrim (angin putting beliung) yang mengganggu stok/persediaan barang dapat menyebabkan terjadinya fluktuasi harga di beberapa wilayah.

Kedua resiko tersebut menjadi tantangan TPID dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok di daerah untuk diantisipasi terjadinya lonjakan harga yang menyebabkan tingkat inflasi dan Indeks Perkembangan Harga (IPH) yang cukup tinggi. Perlu adanya antisipasi dini berupa penerapan beberapa kebijakan pemerintah daerah dalam rangka mempercepat pemenuhan pasokan barang dan pemyiapan dana BTT (biaya tidak terduga).

Dengan adanya beberapa kebijakan yang dilaksanakan dalam rangka antisipasi kenaikan harga barang dan hasil Pemantauan Harga Bahan Kebutuhan Pokok yang dilaksanakan secara intensif serta tetap melakukan sidak pasar oleh pejabat Bupati beserta OPD terkait sehingga harga barang terkendali dan berada pada level yang rendah walaupun pada bulan Desember terjadi kenaikan pada beberapa komoditas sehingga terjadi tekanan pada tingkat IPH yang trendnya naik, namun pada level yang rendah. Hasil pemantauan harga ini, dijadikan sebagai input untuk perhitungan IPH secara berkala. Dari hasil pemantauan harga selama Triwulan IV ini dapat dilaporkan sebagai berikut :

#### **Data Indeks Perkembangan Harga (IPH) Triwulan IV Tahun 2024**

Oktober				Nopember				Desember			
Mg1	Mg2	Mg3	Mg4	Mg1	Mg2	Mg3	Mg4	Mg1	M2	M3	M4

(2.67) (0.05) 0.36 0.51 0.47 0.42 0.51 0.51 (0.24) 0.27 0.75 1.25

Sejalan dengan kondisi IPH Kabupaten Lombok Timur dan Tingkat Inflasi yang terjadi di Propinsi NTB dan Kota Mataram pada Triwulan IV ini yang melandai sejak bulan Juli sampai akhir Triwulan III dan mulai terjadi sedikit tekanan mulai minggu kedua bulan Oktober dan terjadi peningkatan pada akhir bulan Desember namun masih dalam level rendah dan terkendali. Hal ini dapat dilihat pada grafik di bawah ini :

#### **Tingkat Inflasi Year On Year NTB dan Kota Mataram**

	Oktober	Nopember	Desember
NTB	1.44	1.46	1.28
Kota Mataram	1.61	1.82	1.92

Dari Kedua Tabel diatas menunjukkan baik Indeks Perkembangan Harga (IPH) dan Inflasi yang terjadi menunjukkan bahwa IPH Kabupaten Lombok Timur berada pada awal minggu I bulan Oktober berada pada posisi minus (-2,67 yang) pada Minggu I bulan Oktober dan tertinggi pada posisi 1,25 pada Minggu IV bulan Desember. Sedangkan Inflasi Propinsi NTB dan Kota Mataram masing-masing sebagai berikut :

- Propinsi NTB Inflasi tertinggi pada bulan Nopember sebesar 1.46 dan terendah pada bulan Desember sebesar 1.28;
- Kota Mataram mengalami Inflasi tertinggi pada bulan Desember sebesar 1.92 dan terendah pada bulan Oktober sebesar 1.61.

Walaupun NTB dan Kota Mataram mengalami inflasi tetapi masih berada di bawah target inflasi Nasional sebesar  $\pm 2.50$ .

Adapun beberapa komoditas penyumbang Indeks Perkembangan Harga (IPH) di Kabupaten Lombok Timur dan regional NTB, antara lain yaitu :

- Bawang Merah dan Bawang putih
- Cabai Rawit dan Cabai Merah
- Daging Ayam Ras
- Telur Ayam Ras
- Gula pasir
- Minyak goreng
- Tomat sayur

## 2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

1. Kenaikana harga pada beberapa komoditas hortikultura seperti bawang merah, cabe rawit, tomat sayur dan beberapa komoditas pertanian lainnya disebabkan karena memasuki akhir musim dan pasokan mulai mengalami penurunan.
2. Terganggunya pasokan beberapa komoditas dari luar daerah akibat gangguan cuaca, mengakibatkan pasokan komoditas mulai terganggu terutama pada bulan Desember.
3. Pada setiap awal musim hujan sebagaimana tahun-tahun sebelumnya komoditas beras cenderung mengalami kenaikan oleh karena itu perlu dipikirkan solusi dan penerapan kebijakan untuk menjaga agar pasokan beras tetap terjaga.

## 3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

1. Mendorong para distributor untuk menjalin mitra dari daerah lain yang telah difasilitasi oleh pemerintah daerah melalui Kerjasama Antar Daerah (KAD) dengan beberapa Kabupaten antara lain Kabupaten Jember dan Kabupaten Bima dan tetap melakukan Kerjasama ditingkat dengan Para Champion Komoditas di tingkat regional (Champion Cabe dan Bawang Merah) serta Komoditas lainnya untukantisipasi apabila harga-harga komoditas tersebut terutama pada musim penghujan hujan biasanya mengalami kenaikan
2. **Melanjutkan pemberian Stimulus dari APBD berupa bantuan transport untuk mendistribusikan komoditas yang mengalami kenaikan harga**
3. **Tetap melanjutkan Koordinasi TPID melibatkan seluruh stakeholder terkait berupa :**
4. Rapat Koordinasi Tingkat Kabupaten
5. Penyusunan Neraca Pangan Periodik di Kabupaten Lombok Timur.
6. Operasi Pasar Murah
7. Sidak Pasar
8. Program Pangan Lestari untuk menggalakkan Gerakan menanam.
9. Konsistensi Penerapan Kebijakan yang telah dicanangkan oleh Pemerintah di barengi dengan beberapa program dari Pemerintah Pusat terutama Dukungan Program Gerakan Tanam Padi, Program Upland Bawang Putih, dan Tambahan Kuota Pupuk Bersubsidi mendukung kebijakan **Program Penguatan Produktivitas Pertanian sebagai Komitmen Pemerintah Daerah dalam Penanganan Inflasi dan Tetap Menjaga Indeks Perkembangan Harga (IPH) yang rendah.**

## 4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

### 1. **Program Penguatan Produktivitas Pertanian.**

Menyederhanakan prosedur dalam mendapatkan penyaluran pupuk bersubsidi, agar petani dapat memperoleh pupuk tepat waktu, tepat jumlah dan tepat sasaran, dibarengi dengan verifikasi dan validasi penerima pupuk yang berhak, serta penguatan informasi mengenai jadwal dan jenis komoditas yang akan ditanam oleh petani harus terdata dengan baik, sehingga jumlah dan distribusi pupuk yang diperlukan tersedia tepat waktu dan menyeluruh sampai di Kelompok Tani.

## **Melanjutkan pemberian Stimulus dari APBD berupa Subsidi Bunga Bank untuk Pembiayaan Usaha Tani, Peternakan dan UMKM**

Semakin banyaknya masyarakat baik petani, peternak maupun pelaku usaha terutama UMKM mengakses program ini diperlukan komitmen masyarakat untuk patuh dan taat dalam pengembalian pinjamannya, sehingga Lembaga Pembiayaan sebagai Mitra Pemerintah dalam pelaksanaan Program semakin luas menjangkau masyarakat yang memerlukan pembiayaan dalam usahanya.

### **3. Optimalisasi Koordinasi TPID**

Kegiatan-kegiatan koordinasi di Sekretariat TPID sudah berjalan dengan baik namun perlu adanya Fasilitasi dan Penguatan Anggaran dari APBD untuk mendukung upaya penanganan intervensi langsung tatkala harga kebutuhan pokok menunjukkan gejala kenaikan harga sehingga dapat diantisipasi dengan cepat.

### **4. Menindak lanjuti Kerjasama Antar Daerah (KAD) dengan melibatkan para pengusaha local dalam penangan inflasi**

Dengan semakin banyaknya Kerjasama Antar Daerah (KAD) yang telah terjalin, memberikan jaminan penguatan pasokan komoditas dimasing-masing daerah dan memberikan peluang bagi daerah lain yang mengalami gangguan pasokan untuk dipasok oleh daerah lainnya yang telah menjalin Kerjasama, serta harus diperkuat dengan pelibatan bagi pengusaha local untuk mengambil bagian dalam kegiatan tersebut.

### **5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.**

1. Memperbesar dan memperbanyak penggunaan Biaya Tidak Terduga (BTT) yang disisihkan oleh pemerintah daerah untuk penggunaan sewaktu-waktu apabila diperlukan operasi pasar oleh para distributor dan pelaku usaha yang mengikuti Gerakan Operasi Pasar Murah sebagai insentif untuk membantu biaya operasional yang dikeluarkan.
2. Untuk mengurangi resiko kegagalan panen yang diakibatkan oleh cuaca ekstrem dan bahaya hidrometeorologi pemerintah daerah mendorong petani untuk mengikuti program asuransi pertanian baik secara mandiri maupun subsidi yang telah banyak diterapkan di Indonesia adalah Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP). AUTP memberikan ganti rugi jika petani mengalami gagal panen akibat berbagai faktor, seperti banjir, kekeringan, dan organisme pengganggu tanaman (OPT).
3. Mendorong Bulog dan Mitranya untuk tetap melakukan pembelian gabah petani terutama para petani yang mengikuti program pertanian padi diluar musin dan perluasan areal tanam untuk tetap dapat diserap sebagai salah satu stok persediaan pangan untuk mengantisipasi kekurangan pasokan akibat cuaca dan factor distribusi.